

## **BAB IV. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi mengenai upaya yang telah dilakukan Jepang untuk mendukung solusi dua negara. Lebih lanjut, hubungan yang terjalin antara Jepang terhadap Palestina dan Israel, serta ketidakinginan untuk menjadi mediator utama dalam mendamaikan keduanya menimbulkan keambiguan dalam posisi Jepang. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya utama yang dilakukan Jepang untuk mendukung solusi dua negara adalah dengan menyeimbangkan dukungannya terhadap kedua entitas yang berperang. Hal tersebut membuat kebijakan luar negeri yang dikeluarkan cenderung berlawanan dan “setengah-setengah”. Beberapa langkah yang telah dilakukan Jepang adalah dengan melakukan kunjungan kenegaraan terhadap kedua negara, serta melanjutkan bantuan terhadap Palestina dan kerja sama terhadap Israel.

Di bawah kepemimpinan Shinzo Abe yang kedua, dimulai pada tahun 2012, Jepang menyesuaikan pendekatannya terhadap Palestina yang semakin berkembang. Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan dalam bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perubahan ini merupakan hasil dari rasionalisasi Jepang terhadap dinamika konflik yang berlangsung. Salah satu pengamatan penting adalah adanya ketidakseimbangan antara Palestina dan Israel dalam hal kapasitas negara (*nation capacity*), yang mendorong perlunya stimulus ekonomi untuk menciptakan keseimbangan. Namun, perlu dicatat bahwa pergeseran kebijakan ini tidak serta merta menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak awal, Jepang telah menjalin hubungan yang lebih formal dengan Israel dibandingkan dengan Palestina, yang tercermin dari pengakuan diplomatik yang telah diberikan. Peningkatan bantuan terhadap Palestina, yang ditunjukkan melalui inisiasi program JAIP dan CEAPAD, dapat diinterpretasikan sebagai bentuk “pembayaran utang” atas komitmen Jepang terhadap stabilitas kawasan. Meskipun demikian, sebagai negara, Jepang berhasil menunjukkan upaya yang baik dalam menyeimbangkan dukungannya terhadap kedua entitas, meskipun tantangan dan ambiguitas dalam posisinya tetap ada.

Proses dan makna yang lebih dalam dari upaya dukungan Jepang terhadap solusi dua negara dapat ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan teori pilihan rasional. Pertama, pilihan Jepang untuk tetap mendukung solusi dua negara adalah sebuah produk kolektif dari beberapa aktor penting dalam perumusan kebijakan luar negeri, seperti perdana menteri, Kementerian luar negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian perdagangan. Kedua, mendukung solusi dua negara adalah pilihan yang memiliki kegunaan paling tinggi dibandingkan dengan mendukung solusi satu negara. Lebih lanjut, Palestina dan Israel, sebagai aktor, juga dapat dipersepsikan mencoba untuk memanfaatkan posisi Jepang tersebut untuk mendapatkan kegunaan yang maksimal juga. Terakhir, mendukung solusi dua negara oleh Jepang memiliki spesifikasinya tersendiri agar memperjelas manfaat dan cost yang mengikat. Dengan mendapati hal-hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa mendukung solusi dua negara adalah pilihan paling atas dalam urutan dari preferensi yang dimiliki oleh Jepang.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Jepang tidak sepenuhnya berpaling dari aliansinya dengan negara-negara Barat. Perbedaan dalam beberapa sikap yang diambil disebabkan oleh posisinya yang bergantung pada Amerika Serikat dan pasokan energi dari negara-negara Arab, yang memaksa Jepang untuk menjaga hubungan yang seimbang dengan Israel dan calon negara Palestina. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya Jepang dalam mendamaikan kedua pihak tidak cukup untuk menjadikannya pemain utama. Lebih lanjut, Jepang juga tidak ingin menjadi “pemain utama” dalam proses perdamaian tersebut, seperti ditunjukkan oleh sikap keras Jepang yang belum mengakui Palestina sebagai negara meskipun mendukung solusi dua negara.